PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADAAN & PENGIRIMAN TANAH URUG
antara
WIKA-CAKRA KSO
dengan
PT HOLIN KARYA INDONESIA

Nomor : TP.02.01/F.RSA/SPJB.005/WIKA-CAKRA KSO /IV/2016

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (02-04-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Daryanto : Selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9 Jakarta 13340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. PT Holin Karya Indonesia : Selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama **Johan** yang berkedudukan di Jl.Darmawangsa No.25 Karawaci – Tangerang Telp.021 – 3305 5888, 2721 1108, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli material berdasarkan :

1. Surat Penawaran tanggal 1 April 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Tanah Urug tanggal 1 April 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU menyatakan setuju untuk membeli Tanah Urug (tanah merah) dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju menjual Tanah Urug (tanah merah) kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan – ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
LINGKUP JUAL BELI BARANG

1. Yang dimaksud barang adalah: Tanah Urug (tanah puing dan tanah merah)
2. PIHAK KEDUA menjamin mutu atas tanah urug (tanah merah) siap pakai yang dikirim ke proyek.
3. Ketentuan tersebut diatas sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam penawaran.
4. Kondisi barang Franco proyek dengan , volume dan waktu pengiriman berdasarkan pesanan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
JUMLAH DAN HARGA

Harga satuan atas Barang yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah :

No	Nama Barang	Sat	Vol	Harga Sat	Jumlah
1	***Tanah Urug / Tanah Merah***	m3	3.000	80.000	240.000.000
				Jumlah	**240.000.000**

Terbilang : # Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah #

1. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%
2. Volume perkiraan sesuai dengan tabel diatas atau sesuai dengan kebutuhan lapangan/proyek.
3. Harga Satuan kontrak fix unit price.
4. Pembayaran berdasarkan volume pengurugkan sesuai dengan Berita Acara di Lapangan dari kedua belah pihak .

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal **31 Maret 2017**.
2. Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal terdapat sisa volume yang belum dipesan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian.

PASAL 5
PEMESANAN DAN PENGADAAN BARANG

1. Barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pesanan Barang (PPB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Semua PPB menyatakan jenis mutu barang, volume dan harga satuan setiap jenis Barang serta jadwal pengiriman Barang.
2. Penyerahan PPB oleh PIHAK KESATU harus diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada hari terakhir masa berlakunya Perjanjian.
3. PIHAK KEDUA menyediakan Barang On Site (Sampai dengan lokasi) dan waktu pengiriman berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA harus memenuhi secara tepat jadwal penyediaan Barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA. Keterlambatan atau kesalahan penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA seperti diatur dalam pasal 7.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan schedule pengiriman secara bulanan, mingguan dan harian.
6. Untuk Setiap pengiriman barang, PIHAK KEDUA wajib menyertakan : Doket Asli.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 120 (seratus dua puluh) hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 120 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan tagihan yang dilengkapi dengan :
   - Kwitansi
   - Berita Acara Penerimaan Barang (dari PIHAK KESATU)
   - Faktur Pajak
   - Surat jalan
   - Rekap surat jalan
   - Copy PPB

3. Alamat Pengiriman Tagihan :
   Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3.

PASAL 7
D E N D A

1. Denda

   1.1. Apabila oleh karena kesalahan PIHAK KEDUA terjadi kelambatan pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 4 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1 ‰ (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari nilai Surat Pesanan Barang (SPB) yang terlambat, dan maksimal 7 (tujuh) hari keterlambatan.

   1.2. Apabila keterlambatan seperti ayat 1.1 dalam pasal ini terjadi melebihi 7 (tujuh) hari, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk PIHAK KETIGA dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pengiriman barang tersebut sampai dengan selesai dan selisih harga dari penjualan PIHAK KETIGA tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Tindakan penunjukkan kepada PIHAK KETIGA dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah hari ke 7 keterlambatan pengiriman barang oleh PIHAK KEDUA.

1.3. Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Surat Perjanjian atau Surat Pesanan Barang (SPB) ini maka PIHAK PERTAMA berhak menolak barang tersebut. Resiko biaya pengadaan Barang serta jasa angkutannya akibat hal ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan segera mengganti dengan barang yang sesuai, dalam waktu 1 x 24 Jam sejak tanggal penolakan barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Apabila penggantian Barang yang ditolak tidak dapat disediakan sesuai persyaratan, ketentuan pada ayat 1.2. akan diberitahukan dan resiko yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Denda sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh force majeure yang diatur dalam Pasal 8 atau bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal yang demikian PIHAK KEDUA mengajukan jumlah tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas tanpa merubah harga yang telah ditetapkan.

3. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 6, maka PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis dapat menunda pengiriman selanjutnya sampai masalah tersebut diselesaikan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/force majeure menurut Surat Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yaitu, peperangan, blokade, huru-hara, bencana alam (banjir, gempa bumi), pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA) dan kebakaran yang menyebabkan kerusakan mesin PIHAK KEDUA yang langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa / force majeure, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya force majeure untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang kondisi tersebut.

3. Kejadian-kejadian yang termasuk dalam ayat 1 Pasal ini baru dapat diartikan keadaan Memaksa/Force Majeure untuk pekerjaan ini apabila memang terbukti bahwa kejadian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PEMBATALAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Semua pemberitahuan dan surat-surat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, pertama-tama akan diselesaikan dengan musyawarah.

2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan akan diselesaikan atau diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menggunakan peraturan Prosedur BANI.

3. Keputusan BANI adalah final dan mengikat. Serta seluruh biaya BANI menjadi kewajiban dan beban PIHAK yang kalah.

PASAL 11
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

1. PIHAK KEDUA setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan baik itu dilokasi pekerjaan atau dilokasi pabrikasi (workshop) harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA

2. PIHAK PERTAMA akan menunjuk Petugas dari PIHAK PERTAMA sebagai Safety Officer yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan, PIHAK PERTAMA akan memberikan notis kepada PIHAK KEDUA untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.

4. PIHAK PERTAMA berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang terkait dengan pekerjaan PIHAK KEDUA dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 12
AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

2. Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT HOLIN KARYA INDONESIA

Johan
Direktur

PIHAK KESATU
WIKA-CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3

Daryanto
Manajer Proyek